

# Tantangan Geoekonomi Global dan Prospek Integrasi Ekonomi ASEAN

I Gede Wahyu Wicaksana

*Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*

## ABSTRAK

*Kondisi ekonomi ASEAN sedang mengalami peningkatan. Namun, mereka sedang dan akan menghadapi tantangan yang bersumber dari perubahan konstelasi geoekonomi global selama dekade terakhir ini. Artikel ini berupaya mengidentifikasi empat perkembangan signifikan terkait dengan kondisi geoekonomi global. Keempat hal tersebut adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi global, persoalan demografi, tingginya tingkat urbanisasi, dan yang terutama adalah kelangkaan sumber daya. Untuk itu, artikel ini menelaah sejauh mana keempat tantangan tersebut mempengaruhi prospek dari proyek integrasi ekonomi ASEAN. Sebagai simpulan, dipresentasikan beberapa rekomendasi strategik bagi kebijakan dan tindakan untuk memajukan kerjasama ekonomi yang berujung pada integrasi kawasan Asia Tenggara.*

**Kata-Kata Kunci:** ASEAN, kondisi geoekonomi global, integrasi ekonomi, pertumbuhan, demografi, urbanisasi, krisis sumber daya.

*ASEAN's economies are thriving. However, they are facing, and will have to cope with, challenges derived from the changing global geo-economic settings over the last decade. This article aims to identify four significant currents of development of the global geo-economy. They encompass the decline of global economic growth, problems of demography, high rate of urbanization, and most important of the four is scarcity of resources. Then, it examines the extent to which the four global geo-economic challenges affect the prospect of ASEAN's project of economic integration. In the conclusion, it is presented some strategic recommendations for policy and action to advance economic cooperation leading to integration in the Southeast Asian region.*

**Keywords:** ASEAN, global geo-economy, economic integration, growth, demography, urbanization, crisis of resources.

Perekonomian negara-negara Asia Tenggara, khususnya setelah krisis finansial tahun 1997/1998 mulai bangkit. Para pengamat bahkan menyebut era kebangkitan ekonomi Asia Tenggara tidak terbandung (*Financial Times* 30 Oktober 2002). Namun, perkembangan yang positif harus berhadapan dengan tantangan serius yang merupakan kombinasi dari pelbagai aspek dinamika geoekonomi maupun non-ekonomi perkembangan regional dan global. Untuk memudahkan analisis, maka dinamika yang berlangsung dikelompokkan menjadi empat, yang meliputi pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung menurun, masalah demografi, laju urbanisasi yang tinggi, dan yang paling krusial ialah kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*).

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek penting beserta implikasi keempat tantangan geoekonomi global terhadap kinerja ekonomi negara-negara anggota ASEAN yang kian intens mempromosikan pembantuan perekonomian kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi sebagai bagian proyek visioner ASEAN Community. Sebagai kesimpulan akan disampaikan beberapa rekomendasi strategis bagi ASEAN dalam rangka merespon persoalan yang muncul, serta merumuskan kebijakan yang efektif.

### **Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global**

Selama beberapa dekade awal abad ke-20 perekonomian dunia didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat. Inggris, Jerman dan Amerika Serikat memperlihatkan kinerja ekonomi mengesankan pada periode industrialisasi pasca Perang Dunia II (McKinley 2006, 13). Namun, produktivitas mereka tidak bersifat atau berskala global. Sekarang jutaan orang di seluruh dunia berhasil keluar dari kemiskinan dan pendapatan domestik per kapita pun mencapai kurang lebih 4000 dollar AS – sebagai contoh China yang memiliki penduduk terbesar di dunia (*Business Times* 26 Juli 2012). Dengan latar belakang ini kiranya cukup mengherankan apabila tingkat pertumbuhan ekonomi global terus menurun. Alasannya adalah pertumbuhan yang tinggi di negara-negara industri terkemuka ternyata hanya ditopang oleh hutang/pinjaman. Ini berarti bahwa konsumsi di masa depan dikendalikan oleh masa kini. Ambil contoh, di Amerika Serikat tingkat pertumbuhan tabungan nasional (*saving*) untuk sektor rumah tangga tercatat 0% selama 10 tahun pertama milenium ke-3 (Chorafas 2011, 3). Fakta ekonomi memberikan interpretasi historis tentang mengapa penurunan tingkat pertumbuhan terjadi. Data statistik mengindikasikan pada tahun 1975 rumah tangga di Amerika Serikat memiliki tabungan rata-rata bernilai 14,6%. Pada tahun 2011 nilai tabungan hanya sekitar 4% yang berarti tidak ada pertumbuhan sama sekali. Tren yang hampir sama juga terjadi di *Eurozone* – penurunan nilai tabungan dari 13,9%

menjadi hanya sekitar 3% dalam kurun waktu 1975 hingga 2011 (Lane 2012, 50). Catatan sejarah ekonomi menunjukkan ada kaitan antara politik dan perang dengan tingkat pertumbuhan kekayaan individu. Setelah Perang Dunia I berakhir nilai hutang global meningkat hingga 70% dari GDP karena negara-negara Eropa meminjam untuk membiayai perang. Nilai yang terbentuk berangsur berkurang pada masa antara dasa warsa 1920an dan 1930an menyusul pembayaran hutang yang disisihkan dari keuntungan pembangunan ekonomi berteknologi tinggi. Pasca Perang Dunia II terjadi peningkatan lagi hingga hutang global mencapai 100% dari GDP. Angka ini pun berhasil ditekan setelah keberhasilan industrialisasi di Eropa Barat, misalkan pada tahun 1970 nilai yang terbentuk hanya tinggal 30% dari GDP. Yang ironis ialah dewasa ini ketika industrialisasi terus meningkat tabungan justru terus menurun dan hutang global negara-negara kaya hampir senilai dengan 100% dari GDP. Eksplanasi yang bisa dikemukakan ialah ekonomi industri harus dibarengi dengan pertumbuhan pengeluaran yang didukung oleh hutang agar berada pada kecepatan yang sama (Lynn 2011, 22-41).

Akibat penumpukan hutang malah lebih mengkhawatirkan. Hutang global yang terkonsentrasi di negara-negara maju berdampak terhadap perekonomian Dunia Berkembang. Eropa Barat dan Amerika Utara (lebih akrab dengan sebutan OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) seharusnya menabung dan mengalokasikan dana untuk memberi pinjaman bagi ekonomi-ekonomi baru dan berkembang untuk terus tumbuh. Akan tetapi yang terjadi berkebalikan yakni negara-negara berkembanglah yang memberikan pinjaman kepada negara-negara kaya. Sistem keuangan internasional pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Krugman 2007, 18). Tidak ada jalan lain, hutang harus dibayar, dan caranya klasik yaitu mengurangi konsumsi dan menambah tabungan agar bisa digunakan untuk melunasi kewajiban berupa bunga dan pokok hutang. Perdebatan yang santer terdengar di parlemen, media dan kampus di negara-negara OECD ialah bukan masalah pembayaran, tetapi bagaimana mereka dapat membagi beban hutang tersebut (*Foreign Policy* Desember 2012). Selain hutang sektor rumah tangga, negara-negara OECD juga menimbun hutang pada sektor korporasi dan sektor keuangan. Angka yang didapat mencengangkan. Pada pertengahan 2010 total hutang mencapai sekitar 300% dari GDP. Nilai ini meningkat 25% hingga mencapai rekor 400% dari GDP pada akhir 2011 (*Foreign Policy* Desember 2012).

Negara-negara Asia Tenggara sebenarnya memiliki performa ekonomi yang bagus. Secara umum mereka mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan defisit anggaran berkelanjutan. Data yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia

(Asian Development Bank/ADB) mengindikasikan *fiscal balance* terhadap GDP kesepuluh negara Asia Tenggara berkisar di angka -0,1% hingga -8%. Sebuah capaian yang lebih baik daripada Asia Selatan dan Asia Tengah. Sementara Asia Timur kelihatan lebih bagus, namun tidak menunjukkan surplus. Yang cukup mengkhawatirkan adalah hutang publik di negara-negara utama seperti Thailand, Indonesia, Malaysia dan Filipina mencapai hampir 50% dari GDP (ADB 2010). Secara praktis negara-negara di atas memiliki ketergantungan dalam sektor perdagangan maupun keuangan terhadap negara-negara OECD. Limpahan krisis hutang dan pertumbuhan global yang melemah itulah yang merupakan tantangan berat ekonomi Asia Tenggara.

### **Masalah Demografi**

Ditinjau dari aspek demografis, negara-negara Asia dapat dikelompokkan menjadi tiga; negara dengan jumlah penduduk menurun seperti Jepang dan Korea Selatan; negara dengan jumlah penduduk relatif stabil sebagaimana diindikasikan oleh China – penduduk China diprediksi baru akan mengalami pengurangan setelah tahun 2025 atau 2030; dan negara dengan jumlah penduduk terus berkembang yang tercermin dari angka-angka sensus di India, Indonesia, Pakistan, Myanmar, Filipina dan Vietnam (Liu 2001, 5). Divergensi ini tidak seharusnya dikaitkan dengan potensi konflik teritorial ataupun manajemen keamanan dan stabilitas regional. Yang jelas implikasinya adalah pada pertumbuhan ekonomi dan derajat sebaran migrasi termasuk tenaga kerja terampil serta individu terdidik.

Komposisi demografis masyarakat dunia pada 2020 dan memasuki pertengahan abad ke-21 diperkirakan akan mengalami perubahan dengan laju pertumbuhan penduduk berusia di atas 65 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk berusia antara 15 tahun dan 64 tahun. Prediksi tersebut terutama berlaku bagi penduduk di negara-negara OECD, seperti Amerika Serikat dengan perkiraan penduduk berusia di atas 65 tahun pada tahun 2020 sebanyak 24% dan pada tahun 2050 sebesar 34%. Uni Eropa diramalkan akan mengalami penuaan penduduk dengan laju tinggi yakni 22% pada tahun 2020 dan 48% pada tahun 2050. Negara Asia seperti Jepang juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan penduduk usia lanjut di atas 65 tahun tertinggi di dunia, yaitu mencapai 47% di tahun 2020 dan melonjak sampai 74% setelah 30 tahun kemudian. Sementara itu India dan China diperkirakan tidak terlalu drastis dengan masing-masing 17% dan 10% pada tahun 2020 dan di pertengahan abad ini mencapai sekitar 37% serta 21% (NIA 2011). Konsekuensi yang dapat terjadi adalah negara harus memberikan pelayanan kesehatan dan aneka pendukung bagi

para lanjut usia – beragam layanan yang masih jarang terpenuhi di negara-negara Asia.

Distribusi etnik serta agama penduduk Asia pun sedang mengalami perubahan, dengan perkembangan identitas Muslim yang kian meningkat. Sejarah Asia menggambarkan dinamika etnik, kultur dan keagamaan yang kompleks, sehingga perubahan komposisi demografi menurut warna etnisitas bukanlah sebuah fenomena baru yang amat unik. Akan tetapi persoalan dalam konteks politik barangkali akan timbul di dalam demokrasi seperti India ketika setiap negara bagian akan menghadapi kekuatan-kekuatan Muslim yang kian besar jelang dekade 2020an dan 2050an (*Science* 29 Juli 2011).

Bagi negara-negara Asia Tenggara – yang relatif diuntungkan secara demografis karena komposisi penduduk usia lanjut yang terbilang kecil – persoalan kependudukan terletak pada bagaimana kebijakan publik pemerintah mampu menjamin manfaat ekonomi dan sosial untuk generasi muda yang terus tumbuh. Jika tidak perekonomian Asia Tenggara akan terbebani oleh permasalahan penduduk usia lanjut menjelang pertengahan abad ke-21. Hal ini sama dengan mendorong masalah-masalah demografis terjadi di masa depan.

### **Laju Urbanisasi Tinggi**

Data statistik kependudukan mengenai perpindahan urbanisasi memperlihatkan bahwa di dua negara utama Asia yakni China dan India terjadi tren yang meningkat. Pada tahun 1975 hanya sekitar 17% penduduk China yang tinggal di perkotaan. Angka ini naik menjadi 40% pada tahun 2005, dan pada tahun 2015 diprediksi hampir 50% dan 60% pada tahun 2020. Di India pada tahun 1975 sekitar 21% penduduk mendiami wilayah kota. Jumlah meningkat menjadi 28% pada tahun 2005, diperkirakan pada tahun 2015 menjadi 32% dan pada tahun 2012 mencapai 44% (*McKinsey Quarterly* Juli 2010). Potret China dan India adalah dua negara dengan penduduk perkotaan terpadat di Asia dan termasuk 10 besar dunia.

Kemudian muncul tantangan dan juga peluang sebagai akibat urbanisasi yang cepat dalam waktu relatif singkat. Secara sosial banyak orang pindah dari daerah pedesaan dengan basis hubungan bertetangga yang akrab dan saling menunjang ke kota-kota yang tidak memiliki aset sosial tersebut. Komponen GDP beralih dari dominasi sektor pertanian ke industri dan jasa. Ambil contoh bisnis perumahan menjadi penyumbang besar bagi perputaran roda ekonomi nasional (Scholte 2012, 4-5).

Bila dibandingkan China dan India, tingkat urbanisasi di kota-kota Asia Tenggara masih terhitung moderat. Permasalahan-permasalahan sosial yang muncul sebagai dampak urbanisasi cenderung terkendali sehingga tidak sampai menimbulkan gangguan stabilitas. Urbanisasi membantu keberlangsungan proses industrialisasi, namun peralihan mode ekonomi dari agrikultur ke industri akan membebani perekonomian Asia Tenggara yang sedang tumbuh dengan pendapatan perkapita yang tidak merata (Daniels dan Ho 2005, 18-20, 33).

### **Kelangkaan Sumber Daya (*Scarcity of Resources*)**

Dunia saat ini tengah mengalami transisi dari era sumber daya melimpah ruah akibat etos kerja industrialisasi yang luar biasa selama 200 tahun ke masa kelangkaan. Prediksi kecenderungan dimaksud telah dibuat jauh hari, namun acap terbantah terutama berkat optimisme kemajuan teknologi yang mendukung eksplorasi geografis baru (Barker et al. 1994, 12-13). Fakta ekonomi tidak mengkonfirmasi sikap optimis para teknokrat. Harga komoditas naik hampir 100% terhitung mulai tahun 1945 hingga tahun 2000, dan bahkan mencapai tiga kali lipat ketika terjadi resesi ekonomi dunia. Ternyata pertumbuhan ekonomi global yang merosot tidak dibarengi oleh penurunan harga komoditas. Tidak semata harga minyak bumi yang meningkat, melainkan semua jenis produk (IMF 2012). Oleh karena itu, yang terjadi adalah ketidakcukupan persediaan (*shortages*).

Kelangkaan yang mendorong kenaikan harga komoditas mencakup lima elemen terpenting, yaitu; bahan makanan, produk perdagangan, energi/bahan bakar minyak, air dan lingkungan yang bersih berkaitan dengan dampak pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Kelima komponen memiliki arti vital bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Masalah kelangkaan bahan makanan bisa dijumpai di banyak tempat. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) merilis laporan pada akhir 1996 – bertajuk *The Sixth World Food Survey* - yang mengungkapkan bahwa fenomena kelaparan dan kurang gizi terjadi secara luas di 40 negara Dunia Ketiga (yang tersebar di benua/kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin). Enam dari kesepuluh anggota ASEAN (Indonesia, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Filipina) disinyalir berpotensi mengalami kelaparan dan kurang gizi dalam jangka panjang, khususnya karena alih fungsi lahan pertanian yang tidak terencana dan kebijakan nasional yang tidak komprehensif. Statistik FAO memperlihatkan sekitar 1 milyar orang tidak mendapatkan makanan yang layak untuk hidup sehat (*malnourishment*) dengan akibat langsung pada kondisi fisik/stamina

serta kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas perekonomian. Untuk mempertahankan *status quo* ini saja dibutuhkan peningkatan produksi bahan makanan sebanyak minimal 40% hingga tahun 2030 dan sebesar 70% hingga tahun 2070 (FAO 1996).

Berbagai ikhtiar kebijakan dapat dilakukan demi menanggulangi masalah kekurangan bahan makanan. Misalkan dengan membuka tanah untuk lahan pertanian baru. Namun timbul kekhawatiran akan muncul persoalan lingkungan. Laporan oleh FAO (1996) juga mendemonstrasikan skeptisme terhadap upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian yang dipromosikan negara-negara OECD. Bagi lembaga dunia tersebut mengembangkan lahan baru di wilayah yang telah didiami oleh dua pertiga penduduk bumi hanya akan memperburuk situasi kelangkaan; diprediksi terjadi lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan menuju peningkatan produksi bahan makanan.

Di sektor perdagangan ada kecenderungan global bahwa harga komoditas semakin meningkat. Hal ini paralel dengan kegiatan perluasan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh negara-negara pengeksport komoditas. Kebijakan perdagangan dewasa ini berbalik arah dari limitasi impor atas barang dan jasa industri. Negara-negara yang kaya komoditas cenderung menghindari kewajiban impor. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri terang merupakan alasan para pengeksport komoditas untuk mengurangi volume ekspor – di samping terdapat motivasi manipulasi aset kekuatan ekonomi politik internasional. Di sisi pengimpor, ada kekhawatiran terjadi gangguan akses terhadap bahan-bahan mentah yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Negara-negara kaya merespon konsern terhadap kelangkaan komoditas dengan melakukan pembelian bahan mentah, barang tambang dan perusahaan pertambangan dengan mengerahkan pendekatan non-ekonomi. Kebijakan yang ofensif mendatangkan ketakutan bagi negara-negara pengeksport komoditas bahwa independensi ekonomi dan bahkan politik mereka akan terancam (Kerr & Gaisford 2007, 44-47; 66).

Energi khususnya bahan bakar minyak telah menjadi bidang kajian dan subyek studi oleh pelbagai komunitas episteme. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ekonomi dunia sekarang membutuhkan sumber energi yang berkelanjutan (Barker et al. 1994). Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang diperkirakan akan memiliki posisi signifikan lebih tinggi daripada yang diobservasi pada dekade-dekade silam. Statistik Badan Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) menyebutkan pada tahun 2008 Asia mengkonsumsi 60% produk batu bara dunia – dengan China sebanyak 39,1% dan India sebesar 8,8%. Negara industrialis terkemuka seperti Amerika Serikat masih di bawah China dalam hal konsumsi batu bara.

Angka kebutuhan batu bara China dan India diperkirakan akan naik terus (WTO 2008).

Menurut laporan Lembaga Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) yang dirilis tahun 2010, menjelang tahun 2030 China dan India akan semakin tergantung kepada batu bara dengan nilai konsumsi masing-masing sekitar 75% dan 46% untuk pembangkit tenaga listrik saja (IEA 2010). Selain faktor kelangkaan sumber minyak, batu bara dilirik sebagai alternatif karena kalkulasi politik. Kandungan minyak bumi terbesar ditemukan di Timur Tengah, dan jika terjadi perang atau konflik di kawasan Teluk, maka angkatan laut Amerika Serikat akan menutup jalur-jalur strategis Timur Tengah. Krisis tentu beresiko tinggi bagi mereka yang membutuhkan bahan bakar minyak dalam skala besar.

Air adalah sumber daya yang sangat penting dan ketersediaan air kian menipis. Jenis-jenis komoditas lain masih dapat disubstitusi, tetapi air tidak. Kegunaan air bagi industri amat vital. Survei Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang dipublikasikan tahun 2012 memperlihatkan bahwa separuh wilayah China, hampir seluruh wilayah Asia Selatan, dan sebagian Asia Tenggara mengalami kekurangan air. Pada tahun 2030, kebutuhan global akan air secara fisik maupun ekonomi diramalkan akan meningkat sebanyak 40%, yang juga berarti 40% lebih besar daripada pertumbuhan suplai air secara berkelanjutan. Pada tahun 2010, tercatat sektor agrikultur dunia menghabiskan 70% suplai air, sementara industri menyedot 16% yang hampir separuh digunakan untuk produksi energi. Hingga tahun 2030, industrialisasi global akan membutuhkan sekitar 30% suplai air, dengan China akan mendominasi permintaan sebanyak 2/5 jumlah yang ada (40% dari nilai estimasi suplai yang dibutuhkan secara global) (WHO 2012).

Laporan WHO (2012) juga mendemonstrasikan jika wilayah bagian barat bumi dan Afrika akan menjadi *net-exporters*, sedangkan Asia akan menjadi *net-importers*. Eropa disebut berada dalam kondisi yang seimbang. Secara ekonomi, produk komoditas akan diproduksi lebih besar di wilayah yang kaya air, dan karenanya di *net-exporters*.

Dalam perspektif komparatif, Asia Tenggara memiliki potensi yang bagus untuk menghadapi tantangan kekurangan pangan dan air. Negara-negara Asia Selatan akan berjuang keras untuk menangani masalah angka kelahiran tinggi dan pertumbuhan penduduk pesat, sekalipun memiliki ekonomi yang sedang tumbuh dan untuk itu membutuhkan sumber daya semakin besar – baik pangan, air dan energi (WEC 2010). Konsekuensinya adalah wilayah anak benua tersebut akan terdorong ke kondisi stabilitas yang rawan dan rapuh.



Lingkungan yang bersih sekarang ini menjadi sebuah barang mewah, dan merupakan suatu imperatif sosial-ekonomi. Orang tidak begitu saja menerima argumen bahwa kondisi kesehatan yang memburuk diakibatkan oleh situasi lingkungan yang tidak nyaman. Sangkaan akan diarahkan ke pihak pemerintah yang dianggap gagal menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat (Barker et al. 1994, 99). Aspek lingkungan pun telah merambah dunia perdagangan. Semakin sulit untuk menjual produk yang dinilai tidak ramah lingkungan. Konsumen di negara kaya dan miskin sudah semakin cerdas untuk menyeleksi produk menurut standardisasi lingkungan, resiko kesehatan dan etika sosial. Mengabaikan perhatian terhadap persoalan lingkungan ternyata berdampak serius kepada perekonomian (Yu 2005, 25-29). Bank Dunia (2010) menginformasikan jika anggaran nasional China harus menanggung biaya 4,3% bagi beban masalah yang ditimbulkan kerusakan lingkungan. Data secara global menunjukkan bahwa beban yang akan diderita oleh anggaran nasional berbagai bangsa diperkirakan terus naik sebesar 1,5% pertahun, yang hingga tahun 2020 akan terdapat 5,8% beban anggaran untuk polusi air dan udara.

### **Implikasi Bagi Asia Tenggara**

Perekonomian negara-negara Asia Tenggara yang tengah berkembang menghadapi dan terkena implikasi dari keempat tantangan perubahan geoekonomi global di atas. Masalah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun, demografi, urbanisasi dan kelangkaan sumber daya pertamanya akan berimplikasi pada kenaikan terus menerus harga-harga komoditas. Di Asia Tenggara, selain Singapura, semua negara merupakan pengeksport komoditas, dan mendapat keuntungan dari perkembangan bisnis komoditas. Indonesia adalah pengeksport komoditas terbesar di Asia Tenggara. Menurut laporan Lembaga Keuangan Dunia (IMF 2010), Indonesia mencatatkan peningkatan ekspor komoditas sebesar 180% mulai tahun 2003 hingga 2009.

Laporan Badan Perdagangan Dunia yang diumumkan tahun 2011 menyebutkan berkat kemajuan industrialisasi dan kebijakan *outsourcing* untuk produk bahan bakar, tambang dan pertanian, pada tahun 2009 Asia Tenggara mencatatkan volume 30% dari total volume produk perdagangan dunia; yang sekaligus berarti ada potensi yang besar untuk tahun-tahun mendatang. Ekuivalen dengan data ini adalah sinyal dan indikasi bahwa impor komoditas terus tumbuh di China, India, Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa (WTO 2011). Namun perlu kiranya disampaikan di sini bahwa tren manfaat dari ekspor komoditas yang cenderung naik tidak serta merta berarti Asia Tenggara akan kembali ke sektor komoditas dan meninggalkan industrialisasi berteknologi tinggi yang sedang berkembang di seluruh kawasan.

Kutipan ini hanya memperlihatkan jika secara faktual kekuatan ekonomi Asia Tenggara memang ada di sektor ekspor komoditas.

Asia Tenggara mungkin merupakan salah satu dari kawasan ekonomi di dunia yang mampu mengembangkan perekonomian yang beragam; meliputi sektor komoditas, jasa, manufaktur dan teknologi tinggi. Tantangan yang dihadapi ialah bagaimana strategi menciptakan kombinasi yang ideal antara ekonomi masing-masing negara dan secara internal. Jika hal ini bisa dilakukan, maka Asia Tenggara akan tampil sebagai regionalisasi ekonomi yang kokoh menghadapi intrusi persoalan eksternal bila dibandingkan wilayah ekonomi lain yang menitikberatkan hanya pada satu atau dua sektor semata (Kerr & Gaisford 2007, 71-88). Manakala kawasan dunia lain dilanda oleh persoalan pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun, demografi, urbanisasi dan kelangkaan, Asia Tenggara justru dapat memetik keuntungan karena potensi-potensinya dalam menanggulangi tantangan tersebut. Ini sekaligus bisa menjadi kekuatan dalam proses integrasi kawasan dan negosiasi-negosiasi demi mempromosikan kepentingan regional di arena global. Esensinya, pihak luar akan bergantung kepada cara Asia Tenggara untuk melihat bagaimana keempat tantangan global mengubah peta kompetisi dan fokus pada parameter kompetitif baru.

Perubahan pertama adalah menyangkut definisi produktivitas dalam industri. Teorisasi ekonomi telah selama hampir 200 tahun menganggap tenaga kerja sebagai faktor penting yang langka. Riset, teknologi dan inovasi diarahkan guna mendukung produktivitas relatif tenaga kerja yang dihitung dengan proses produksi per jam kerja manusia. Ini berarti produktivitas berbanding lurus dengan jumlah produksi, sementara berbanding terbalik dengan jam kerja. Menurut pengertian matematika ekonomi pengangguran mengancam stabilitas dan produktivitas, dan karenanya teknologi dan pendidikan difokuskan untuk menciptakan tenaga kerja yang efisien (Kerr & Gaisford 2007, 99-100).

Di masa depan faktor kelangkaan akan dibentuk oleh komoditas. Oleh sebab itu diperlukan dua hal; *pertama*, perubahan cara pandang tentang makna produksi per unit sumber daya; dan *kedua*, reorientasi penelitian, teknologi dan inovasi dalam menciptakan keseimbangan baru antara faktor-faktor produksi. Dalam konteks ini pula, pemenang dari persaingan ekonomi global di masa depan adalah negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas unggul untuk menarik output sumber daya pihak lawan, yang ditambah dengan pemahaman teknologi dari konsentrasi terhadap tenaga kerja menuju penghematan sumber daya (*Business Wire* 28 Agustus 2012).

Tantangan dan peluang bagi Asia Tenggara adalah bagaimana secara tepat melakukan kedua kebijakan di atas. Sikap optimisme berlebihan

atas kepemilikan sumber daya bisa menjadi faktor yang menyingkirkan arti penting teknologi sebagai penunjang penghematan sumber daya. Jika institusi ekonomi yang dibangun oleh negara-negara Asia Tenggara tidak menangkap peluang ini, maka akan diambil oleh pihak lain. Kesadaran yang lebih mendalam mengenai penggunaan sumber daya, misalnya faktor eksternal yang mengurangi profit dan justru menambah biaya (polusi dan perubahan iklim) serta dampak pada kesehatan dan keselamatan akan membantu Asia Tenggara keluar dari lingkaran persoalan demografi, urbanisasi dan kelangkaan lingkungan bersih.

Perubahan kedua berkenaan dengan geografi ekonomi. Selama setengah abad terakhir globalisasi perekonomian didorong oleh sebuah revolusi transportasi dan logistik yang membuat biaya transport menjadi komponen yang tidak terlampau menentukan dalam produk akhir. Keuntungan ini adalah hasil dari kombinasi antara energi murah dan kemajuan teknologi (Kerr & Gaisford 2007, 123-125). Yang menjadi masalah ialah energi juga mengikuti tren kelangkaan, walaupun biaya dapat diefisienkan melalui sistem transportasi, perlu dipikirkan bahwa pengiriman akan tetap memakan biaya di tengah rantai suplai yang sedang berubah. Kemungkinannya rantai persediaan akan semakin rapat bila barang dan jasa diproduksi di tempat yang mendekatkan antara pusat produksi dan pemasaran. Aspek yang lain ialah perhitungan ekonomi menunjukkan jika transportasi laut lebih efisien daripada darat. Sehingga pengembangan pusat-pusat produksi berada di wilayah pantai. Situasi ini menguntungkan Asia Tenggara dimana 40% penduduknya tinggal di zona 45 mil dari laut (Bagchi-Sen 2006, 27-30). Di balik keuntungan natural tersebut, negara-negara Asia Tenggara menghadapi masalah yakni mode utama transportasi darat yang selama ini menjadi sentral kebijakan perhubungan menghasilkan efek gas rumah kaca. Implikasinya jelas adalah demografi dan urbanisasi yang dilayani dengan transportasi darat meningkatkan resiko kelangkaan lingkungan bersih sebagai faktor penting perdagangan. Konsekuensi logis dari keuntungan dan kelemahan tersebut adalah terdapat potensi jika pembangunan ekonomi di wilayah daratan dan maritim Asia Tenggara akan beresiko menimbulkan perpecahan ekonomi, dan bahkan politik. Faktanya wilayah maritim Asia Tenggara sejauh ini menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada daratan (Bagchi-Sen 2006, 45).

Perubahan ketiga terkait dengan penggunaan tenaga kerja terampil dan murah. Kemunculan China sebagai sebuah sentra produksi mengisyaratkan pemakaian tenaga kerja murah untuk memulai proses pembangunan – strategi yang pernah dirujuk oleh Jepang – telah memasuki babak baru dengan dimensi berbeda. China tampil sebagai lokasi manufaktur berskala global. Efisiensi dan efektivitas biaya

menjadi faktor penentu fisibilitas proses tersebut. Walaupun pada awalnya produktivitas dan kualitas lebih rendah, akan tetapi nilai total perbedaan biaya terhitung tetap lebih murah daripada biaya kedua segmen itu. Efisiensi lewat tenaga kerja murah ternyata tidak selalu mendatangkan keuntungan – terlebih bila diharap akan berlanjut terus. Ada kecenderungan yakni konsumen tidak lagi melihat harga sebagai faktor terpenting, dan menambahkan unsur etika dan nilai. Untuk itu dalam beberapa kasus bukan hanya perlakuan perusahaan terhadap tenaga kerja yang menjadi sorotan, melainkan bagaimana pemerintah menerapkan aturan dan standar kerja yang layak menurut kriteria etika dan referensi nilai konsumen tertentu (Kerr & Gaisford 2007, 144). Segaris dengan konsern terhadap etika dan nilai, Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) melaporkan bahwa pada tahun 2015 kekuatan dan daya tarik tenaga kerja China di dalam negerinya akan menurun. Akan terjadi perpindahan industri secara masif keluar China. Sasarannya adalah ke wilayah Asia Selatan, dan sebagian Asia Tenggara; seperti Indonesia, Vietnam, Filipina dan Myanmar (Sheldon et.al 2011, 33-44).

Argumen utama yang menjelaskan mengapa tren penurunan daya tarik tenaga kerja murah di China terjadi ialah ekonomi negeri tirai bambu itu telah memasuki level '*middle-income trap*' yaitu terlalu tinggi untuk membayar upah rendah, tetapi belum cukup mampu untuk mendanai riset dan pengembangan (R&D) demi beralih ke parameter kualitas daripada sekadar harga. Pemerintah China sangat giat dengan upaya R&D demi mencapai pertumbuhan yang berkualitas. Para ekonom menyatakan kalau sebuah negara tengah memasuki fase *middle-income trap*, maka ia akan sangat sulit mengendalikan laju pertumbuhan ekonominya (Sheldon et.al 2011, 46). Teorema ini tentu tidak sepenuhnya tepat untuk kasus China. Namun, setidaknya ini dapat membuka perspektif peluang bagi Indonesia dan Vietnam yang memiliki penduduk besar dan pertumbuhan tinggi.

Lapoean Bank Dunia tahun 2001 sempat menyebutkan adanya kecenderungan de-industrialisasi di Indonesia terutama dalam tahun-tahun pertama pasca krisis moneter 1997. Nilai total sektor manufaktur dalam GDP rata-rata mulai tahun 1999 hingga 2001 memang masing sekitar 27% sampai 28%. Namun sektor-sektor manufaktur kecil cenderung nonkompetitif. Faktor pendorongnya ialah banjir produk China di pasaran ekspor. Untungnya tren ini tidak berlangsung terlalu lama. Jelang tahun 2004 sudah tercatat peningkatan sektor manufaktur kecil di Indonesia, yang rata-rata dalam 8 tahun terakhir telah naik hampir 3,4% per-anum. Sehingga, tidak berlebihan jika ada hipotesis bahwa perpaduan yang kuat antara industrialisasi dan kepemilikan sumber daya (termasuk populasi) di Indonesia akan berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi (Aswicahyono et al. 2010, 1084-

1104). Dalam sudut pandang yang kurang optimis ialah apakah sebagai negara terbesar di Asia Tenggara tren menggembirakan di Indonesia akan memberi implikasi positif pula bagi negara-negara tetangga? Satu optimisme adalah, dengan kekuatan Thailand, Vietnam dan Filipina dalam sektor komoditas pertanian, Malaysia yang sudah menjadi produsen teknologi tinggi kelas menengah, dan Singapura sebagai destinasi investasi – tidak hanya regional tetapi global – akan cukup memberi prospek bagi ekonomi dan integrasi ekonomi Asia Tenggara di dalam arena ekonomi dunia yang tidak menentu.

### **Simpulan**

Apa yang harus dilakukan pemerintah negara-negara ASEAN dalam merespon – dan mengambil manfaat dari perspektif yang positif – keempat tantangan global, dan menuju penciptaan suatu ‘Masyarakat Ekonomi ASEAN’? Perubahan tentu tidak akan datang dengan sendirinya. Hal itu tergantung pada kepemimpinan politik di Asia Tenggara untuk mewujudkan kondisi-kondisi seperti *good-state-governance* dan *good-corporate-governance* demi menunjang pertumbuhan ekonomi (Hill dan Thompson 2006, 773).

*Pertama*, memperhatikan dengan seksama situasi hutang negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, para investor pasti akan lebih mempertimbangkan faktor resiko dalam melakukan investasi. Untuk itu dibutuhkan kebijakan ekonomi yang mawas diri (*prudent*). Pemerintah negara-negara ASEAN perlu memperhatikan dua komponen penting; defisit neraca pembayaran dan hutang negara agar tidak melampaui batas rasio kapabilitas ekonomi nasional.

*Kedua*, negara-negara Asia Tenggara pastilah memiliki percaya diri (*confidence*) yang tinggi terhadap kepemilikan sumber-sumber alam, kecenderungan yang juga tampak hampir merata di seluruh Asia – termasuk Asia Selatan dan Asia Timur. Dalam hal ini, integrasi ekonomi sebagai sebuah proyek bisnis dan politik harus dibarengi oleh langkah kebijakan yang lebih konstruktif; misalnya meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa melalui pencabutan restriksi dan diskriminasi produk luar dan penghentian praktek proteksi terhadap komoditas dalam negeri. Produksi juga harus ditingkatkan dengan cara mempermudah ruang gerak kapital dan penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*). Jika tidak, investor akan khawatir untuk mengalokasikan modal secara penuh ke Asia Tenggara.

*Ketiga*, dalam suatu skema integrasi ekonomi kawasan, acap kali terlewatkan pandangan bahwa investor tidak akan menanamkan modal apabila mereka belum merasa cukup yakin kalau dana yang

diinvestasikan kembali. Investor senantiasa berasumsi bahwa modal harus bisa beroperasi secara bebas di dalam ekonomi internasional yang terpadu. Itulah sebabnya menjadi krusial bagi proyek integrasi ekonomi Asia Tenggara untuk mempromosikan aturan-aturan perdagangan dan investasi yang terkoordinasi, sehingga ada jaminan kepastian bagi para penanam modal. Efeknya positif yakni membuat rantai suplai berkembang.

*Keempat*, perubahan dalam rantai suplai dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti demografi, urbanisasi dan kelangkaan sumber daya, dengan implikasinya pada sistem transportasi. Gagasan intinya adalah Asia Tenggara harus membangun sistem transportasi yang kompak antara sentra-sentra produksi komoditas. ASEAN perlu merumuskan *blueprint* geoekonomi yang mencakup setidaknya tiga poin penting; 1) peran wilayah perkotaan yang ternyata telah menjadi pusat-pusat aktivitas ekonomi dan produksi; 2) pembacaan dinamika demografi dan analisis beban-keuntungan yang menyertainya; dan 3) antisipasi menyeluruh dampak-dampak kelangkaan sumber daya seperti air, energi, komoditas, bahan pangan, dan lingkungan yang bersih dan sehat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Bagchi-Sen, Sharmistha, 2006. *Economic Geography: Past, Present and Future*. Hoboken: Taylor & Francis.
- Barker, Terry et al., 1994. *Global Warming and Energy Demand*. Hoboken: Routledge.
- Chorafas, Dimitris N., 2011. *Sovereign Debt Crisis: The New Normal and the Newly Poor*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Daniels, P. W dan Khong Chong Ho, 2005. *Service Industries and Asia-Pacific Cities: New Development Trajectories*. London & New York: Routledge.
- Kerr, Walter A., dan James D. Gaisford, 2007. *Handbook on International Trade Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Krugman, Paul, 2007. *Currency Crisis*. Chicago: Chicago University Press.
- Liu, Cuirong, 2001. *Asian Population History*. Oxford: Oxford University Press.
- Lynn, Mathew, 2011. *Bust, Greece, the Euro, and the Sovereign Debt*. Hoboken: Bloomberg Press.
- McKinley, Michael, 2006. *Economic Globalization as a Religious War*. London: Routledge.

- Sheldon, Peter et al., 2011. *China's Changing Workplace: Dynamism, Diversity and Disparity*. Hoboken: Taylor & Francis.
- Yu, Eden Siu-Hung, 2005. *Environmental Policy, International Trade and Market Factor*. Burlington: Emerald Group Publishing.

### **Artikel Jurnal**

- Aswicahyono, Haryo et al., 2010. "Industrialization After A Deep Economic Crisis: Indonesia (Report)", *Journal of Development Studies*, **46** (6): 1084-1104.
- Hill, Stephen dan Dixon Thompson, 2006. "Understanding Managers' Views of Global Environmental Risk", *Environmental Management*, **37** (6): 773-787.
- Lane, Peter R., 2012. "The European Sovereign Debt Crisis", *The Journal of Economic Perspective*, **26** (3): 49-67.
- Scholte, Jane A., 2012. "Poor People in Rich Countries: The Roles of Global Governance", *Global Social Policy*, **12** (1): 3-23.

### **Laporan Tahunan**

- Asian Development Bank (ADB), 2010. *Asian Development Outlook 2010: Macroeconomic Management Beyond the Crisis*.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1996. *The Sixth World Food Survey*.
- International Energy Agency (IEA), 2010. *IEA Energy Statistics for Coal and Peat*.
- World Energy Council (WEC), 2010. *2010 Survey of Energy Resources*.

### **Artikel Online**

- International Monetary Fund (IMF), 2009. "IMF Country Report – Indonesia" [online]. dalam <http://www.imf.org/external/country/IDN/>. [diakses 21 Februari 2013].
- \_\_\_\_\_, 2012. "Commodity Price Rebound on Shortfalls" [online]. dalam <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/res101212a.htm>. [diakses 21 Februari 2013].
- National Institute on Aging (NIA), 2011. "Population Survey" [online]. dalam [www.nia.nih.gov](http://www.nia.nih.gov). [diakses 4 April 2013].
- World Bank, 2010. "Urban Solid Waste Management – Environmental Issues" [online]. dalam <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:20239724~menuPK:497767~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html>. [diakses 23 September 2013].

- World Health Organization (WHO), 2012. "Fact Sheet – Survey of Water Entitlement Sellers" [online]. dalam [www.who.org](http://www.who.org). [diakses 11 Nopember 2013].
- World Trade Organization (WTO), 2008. "The Economics of Trade in Natural Resources" [online]. dalam [www.wto.org](http://www.wto.org). [diakses 11 Nopember 2013].
- \_\_\_\_\_, 2011. "International Trade Statistics" [online]. dalam [www.wto.org](http://www.wto.org). [diakses 11 Nopember 2013].

### **Papers Collection**

*Business Times* 26 Juli 2012, *Business Wire* 28 Augustus 2012, *Financial Times* 30 Oktober 2002, *Foreign Policy* December 2012, *McKinsey Quarterly* Juli 2010, *Science* 29 Juli 2011, bisa diakses melalui [www.globalfactiva.com](http://www.globalfactiva.com).